

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI**

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI
Hari, Tanggal : Selasa, 5 Pebruari 2013
Pukul : 13.30 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Tubagus Hasanuddin, SE, MM, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP, Kabagset Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Pembahasan Dana Optimalisasi Kemhan/TNI TA 2012 sebesar Rp. 678 M
Hadir :orang dari 46 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : - Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, SE
- Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo
- Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Marsetio
- Kepala Staf TNI AU, Marsekal Madya TNI I.B. Putu Dunia
Beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2013 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran TNI Tahun Anggaran 2012 sebesar 98,75 %, serta peningkatan capaian kinerja TNI dibandingkan capaian kinerja Tahun 2011 (Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB). Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI minta TNI untuk terus meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Terkait pernyataan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL bahwa peralatan/Alutsista yang dialokasikan pada Dana Optimalisasi APBN-P Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2012 yaitu: 1 (satu) paket enkripsi, 1 (satu) paket *tactical communication*, 1 (satu) paket Monobs DF, dan 135 (seratus tiga puluh lima) alat selam closed circuit dan semi closed circuit, bersifat sangat prioritas, serta permintaan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL agar pengadaan peralatan/Alutsistas tersebut dapat dialokasikan kembali pada APBN TNI Tahun Anggaran 2013, maka Komisi I DPR RI mendukung pengadaan peralatan/Alutsista tersebut dialokasikan kembali pada APBN TNI Tahun Anggaran 2013.
3. Sehubungan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan TNI TA. 2011, Komisi I DPR RI minta TNI untuk memperhatikan rekomendasi dan catatan-catatan BPK RI dan menjadikannya sebagai panduan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

4. Mencermati permasalahan tanah dan perumahan di lingkungan TNI, Komisi I DPR RI mendesak TNI dan pihak pihak lain yang terkait untuk melaksanakan Moratorium. Dalam hal penanganan terhadap tanah TNI yang masih bersengketa dengan masyarakat, Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk terus mengupayakan penyelesaian dengan cara-cara persuasif dengan mengedepankan musyawarah. Adapun untuk penyelesaian secara komprehensif mengenai persoalan sengketa tanah TNI akan dibahas secara bersama-sama antara Komisi I DPR RI, Kemhan, TNI, Kemkeu, BPN, dan pihak-pihak lain yang terkait/berwenang melalui Panja Tanah/Rumah Dinas Komisi I DPR RI.
5. Komisi I DPR RI menilai masih adanya hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. berkaitan dengan hal tersebut Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai berikut:
 - a) Tetap konsisten dengan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan, dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista.
 - b) Memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam setiap pengadaan Alutsista agar Alutsista dimaksud memiliki daya penggentar (*deterrence effect*) yang maksimal.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.10 WIB

Jakarta, 5 Pebruari 2013
KETUA RAPAT,

TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM.
A-350